

# PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN: SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Oleh  
*Loekman Soetrisno\**

## 1. Pendahuluan

Ketika pemerintah Indonesia dua puluh lima tahun yang lampau mencanangkan Era Pembangunan bagi bangsa Indonesia, ketika itu pula hidup anak bangsa ini mulai dibebani oleh berbagai tuntutan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan anak bangsa ini terhadap pembangunan Indonesia. Para petani dituntut oleh pangan demi keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia. Demikian pula demi pembangunan, rakyat pemilik tanah harus rela tanah mereka dibebaskan oleh pemerintah dengan harga rendah guna memberi dukungan terhadap proses pembangunan di Indonesia. Kaum wanita tidak terkecuali, mereka pun dituntut untuk menyumbang melalui peran sosial, politik, ekonomi mereka, menunjang keberhasilan pembangunan.

Untuk meningkatkan peran wanita Indonesia dalam pembangunan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Dalam bidang organisasi untuk menunjang program peningkatan peranan wanita Indonesia dalam pembangunan, pemerintah telah membentuk berbagai organisasi wanita yang secara garis besar dikategorikan menjadi: (1) para istri pegawai negeri

dikelompokkan dalam Dharma Wanita; (2) para istri anggota ABRI dikelompokkan dalam Dharma Pertiwi; (3) bagi para ibu rumah tangga di daerah pedesaan dan di kota yang bukan istri pegawai negeri/istri ABRI diciptakan organisasi PKK yang secara eksplisit dinyatakan oleh GBHN 1983 sebagai salah satu organisasi wanita untuk mendorong partisipasi wanita Indonesia dalam pembangunan (Nursyahbani Katjasungkana, 1989: 41). Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan wanita Indonesia dalam pembangunan tidak hanya berhenti dalam pengelompokan wanita Indonesia dalam organisasi wanita yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun pemerintah juga telah menentukan pula peran yang seharusnya dilakukan oleh wanita dalam pembangunan melalui apa yang kita kenal dengan *Panca Tugas Wanita*, yaitu: (1) sebagai istri, supaya dapat mendampingi suami, sebagai kekasih dan sahabat bersama-sama membina keluarga yang bahagia; (2) sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda, supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani maupun jasmani dalam menghadapi segala tantangan jaman dan menjadi manusia yang berguna bagi

---

\* Dr. Loekman Soetrisno adalah staf pengajar Fakultas Sastra UGM dan staf peneliti Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, UGM.

nusa dan bangsa; (3) sebagai ibu pengatur rumah tangga supaya rumah tangga merupakan tempat yang aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga; (4) sebagai tenaga kerja dan dalam profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta, dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga; (5) sebagai anggota organisasi masyarakat terutama organisasi wanita, badan-badan sosial dan sebagainya, untuk menyumbangkan tenaga kepada masyarakat, (Nani Suwondo, 1984, dikutip oleh Nursyahbani Katjasungkana, 1989: 45).

Dengan diciptakan wadah/ organisasi bagi wanita Indonesia dan telah digariskan bentuk-bentuk peran wanita dalam pembangunan, maka pemerintah dengan demikian mengharapkan peran wanita Indonesia dalam pembangunan dapat meningkat. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dalam hal ini. Pertama, ketika peran wanita dalam pembangunan telah ditingkatkan, bagaimana perlakuan pembangunan terhadap kaum wanita itu sendiri? Artinya apakah dengan peningkatan peran wanita dalam pembangunan, maka kaum wanita juga memperoleh "reward" dari pembangunan yang didukung oleh kelompok wanita itu? Pertanyaan lain adalah apakah rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan itu menegakkan otonomi wanita Indonesia atau sebaliknya justru meletakkan wanita Indonesia di bawah penindasan baru yakni pembangunan di samping penindasan lama yakni kaum pria?

Makalah ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan itu.

## 2. Pembangunan dan Kaum Wanita

Hampir setiap seminar wanita Indonesia maka salah satu topik yang paling banyak dibicarakan dalam seminar itu adalah bagaimana kita dapat meningkatkan peranan wanita Indonesia dalam pembangunan negara kita. Topik peranan wanita dan pembangunan beranjak dari satu asumsi dasar bahwa peran atau sumbangan wanita Indonesia dalam pembangunan masih belum memadai. Dari asumsi ini maka muncullah konsepsi peran ganda wanita Indonesia, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai anggota masyarakat yang harus mampu dan mau menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka untuk mengembangkan sosial dan ekonomi masyarakat dan diri mereka masing-masing. Namun seminar tentang wanita Indonesia sepengetahuan saya belum pernah membicarakan secara serius tentang bagaimana pembangunan itu memperlakukan wanita Indonesia, khususnya wanita miskin yang memang tidak pernah dapat hadir dalam seminar wanita di Indonesia. Pada hal menurut hemat saya justru permasalahan ini, perlakuan pembangunan terhadap wanita, yang merupakan permasalahan ini yang saat ini sedang dihadapi oleh kaum wanita Indonesia.

Ada beberapa permasalahan yang muncul apabila dalam usaha kita mencari pemecahan tentang permasalahan wanita Indonesia kita beranjak dari asumsi bahwa peranan wanita dalam pembangunan Indonesia masih kurang dan perlu ditingkatkan. Pertama, tanpa kita sadari dengan memfokuskan perhatian kita pada peranan wanita dalam pembangunan seperti yang sudah saya singgung di atas, akan mendapatkan wanita Indonesia di bawah suatu dominasi baru yakni

pembangunan itu sendiri. Keadaan akan muncul di mana pembangunan bukan lagi untuk wanita melainkan wanita untuk pembangunan. Tentang permasalahan ini seyogyanya kita renungkan makna dari ucapan Tuti Heraty Noerhadi, seorang filosof wanita Indonesia. Ia berkata:

. . . Sebab bukan demi pembangunan itu sendiri kaum wanita harus mengadakan refleksi, melainkan dari satu kenyataan saja, bahwa kaum wanita harus diletakkan sebagai manusia. Membangun, posisi kaum wanita sebagai manusia itu dimana? (Tuti Heraty Noerhadi, 1989: 59).

Permasalahan kedua yang muncul adalah menyangkut *validitas* dari asumsi itu sendiri. Kita dapat menanyakan apakah *memang benar* kontribusi wanita Indonesia dalam proses pembangunan memang minim sehingga perlu digalakkan? Demikian pula, apakah kontribusi kaum pria dalam pembangunan itu jauh lebih besar dari kontribusi wanita dalam pembangunan, sehingga *banya* peranan kaum wanita sajalah yang harus ditingkatkan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah tergantung pada bagaimana kita *memberikan makna* terhadap konsep peranan wanita dalam pembangunan itu *dari jumlah* wanita yang menjadi pegawai negeri atau yang duduk dalam jabatan kunci di negara kita, memang harus diakui sangat sedikit. Dari seluruh pegawai negeri Indonesia yang berjumlah  $\pm$  3 juta, pegawai negeri wanita hanya 764.137 orang, dari jumlah itu hanya 3 persen dari pegawai negeri wanita yang menduduki golongan III (Wardah Hafida, 1989: 12, dikutip oleh Nursyahbani katjasungkana, 1989: 45).

Yang perlu dipertanyakan adalah rendahnya jumlah pegawai negeri wanita itu disebabkan karena rendahnya kemauan wanita Indonesia untuk berperan dalam pembangunan ataukah karena sebab lain seperti umpamanya prioritas perekrutan pegawai negeri itu hanya diberikan kepada kelompok pria. Bukankah secara resmi pemerintah Indonesia belum pernah mengeluarkan undang-undang yang menjamin *equal right* dalam pengangkatan pegawai negeri atau swasta.

Situasi akan berbeda apabila kita lihat pada sektor pertanian. Saya yakin peranan wanita dalam pembangunan cukup memadai. Tanpa kerja keras dan pengorbanan wanita tani Indonesia maka tidak mungkin Indonesia mencapai swasembada pangan. Di Propinsi DI Yogyakarta dapat dikatakan bahwa mayoritas kader kesehatan di daerah pedesaan adalah wanita. Demikian pula apabila karya ibu-ibu rumah tangga yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanan dalam membina keluarga mereka diakui sebagai kontribusi wanita dalam pembangunan, maka tidak terkira besarnya kontribusi kaum wanita dalam pembangunan Indonesia.

Pertanyaan lain adalah menyangkut konsep kodrat yang sering dikaitkan dengan peranan wanita dalam pembangunan. Konsep kodrat menurut hemat saya mengandung pengertian penguatan mitos-mitos yang hidup di kalangan masyarakat tentang wanita. Kodrat cenderung memaksa kita untuk membatasi usaha-usaha kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum wanita. Tentang hal ini Tuti Heraty Noerhadi (1989) mengusulkan agar kita meninggalkan konsep kodrat wanita dan menggantikannya dengan konsep

*martabat wanita* sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi oleh wanita Indonesia. Tentang hal ini Tuti berkata:

.... Dengan memakai istilah *martabat* tersebut kita telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai potensi untuk maju ke segenap kemungkinan. Sedangkan kalau kita tetap menggunakan istilah *kodrat* sepertinya manusia ini terjebak kedalam keadaan baku yang tidak bisa dirubah. *Kodrat* seakan-akan membatasi ruang gerak manusia itu sendiri. Dan terdapat kecenderungan yang kuat, bahwa istilah *kodrat* selalu diperuntukkan untuk wanita dan istilah *martabat* dialamatkan kepada pria. Hal ini jelas tidak adil, sebab sebagai manusia kita mempunyai potensi yang sama. (Tuti Heraty Noerhadi, 1989: 60)

Di samping itu dalam realita kehidupan kelompok wanita miskin, *kodrat* bukan lagi merupakan nilai yang mereka hayati. Para wanita Bali umpamanya tidak merasa rih untuk mengerjakan pekerjaan yang dari segi *kodrat* tidak layak dilakukan oleh seorang wanita seperti bekerja sebagai kuli bangunan. Oleh karena itu pelestarian konsep *kodrat* sebagai dasar kebijaksanaan pengembangan kehidupan wanita Indonesia selain tidak *valid* lagi juga terasa sebagai *suatu konsep yang elitis*.

Sekarang marilah kita kembali pada masalah bagaimana pembangunan itu dampaknya terhadap wanita. Pada akhir tahun 1960-an dalam rangka pembangunan pertanian, khususnya pembangunan subsektor tanaman pangan, pemerintah mengintrodusir berbagai program pembangunan dalam

kerangka melaksanakan Revolusi Hijau. Dengan partisipasi petani Indonesia, Revolusi hijau telah berhasil menaikkan secara drastis produksi pertanian Indonesia, khususnya produksi subsektor pangan. Namun kenaikan produksi itu sendiri ternyata diikuti dengan pengorbanan kaum wanita pedesaan, khususnya mereka yang miskin yang harus kehilangan mata pencaharian mereka. Kaum wanita miskin terpaksa tidak dapat mengikuti peristiwa panen di desa mereka secara bebas karena para pemilik sawah membatasi jumlah wanita miskin yang diijinkan ikut panen di sawah mereka. Ketika terjadi perubahan teknologi panen dari ani-ani ke teknologi sabit, maka sekali lagi kelompok wanita miskin terpaksa menyingkir dan tempatnya digantikan oleh buruh tani pria. Demikian pula ketika terjadi perubahan teknologi *buller* maka ratusan bahkan mungkin ribuan wanita miskin di pedesaan yang bermata pencaharian penumbuk padi terpaksa mengganggu karena mesin *buller* telah menggantikan mereka. Penelitian tentang dampak ini terhadap kesejahteraan dari perolehan bawon panen si ibu atau anak perempuan mereka belum ada di Indonesia. Tetapi yang jelas bahwa perubahan-perubahan ini mengakibatkan para kelompok wanita miskin harus menggantungkan *food security* keluarga mereka pada pasar bebas. Inilah mungkin sebab mengapa beberapa keluarga miskin di suatu desa di sebuah kabupaten di Jawa Barat seperti diberitahukan oleh sebuah harian ibukota terpaksa *barus makan beras aking* karena mereka tidak mampu membeli beras di pasaran bebas.

Pergeseran tenaga buruh wanita oleh tenaga buruh pria dilaporkan oleh Susanna Preece (1989) juga terjadi di

sektor industri tekstil dan batik. Susanna Price melaporkan ketika teknologi cap mulai digunakan dalam industri batik, maka pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan yang menghasilkan upah yang tinggi semua dimonopoli oleh pekerja-pekerja pria, sedang buruh-buruh wanita yang semula mengerjakan pekerjaan yang sama dipaksa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan dan upah mereka pun rendah (Susanna Price, 1983: 102). Sementara itu Willer (1980) melaporkan bahwa industrialisasi dan semakin beragamnya *labor force* di negara-negara sedang berkembang menyebabkan turunya wibawa (*authority*) wanita dalam rumah tangga mereka. Pembangunan industri yang terpusat di daerah perkotaan dan tetap langkanya kesempatan kerja di daerah pedesaan membuat banyak laki-laki di daerah pedesaan mencari pekerjaan di kota-kota yang jauh dari desa mereka. Jauhnya tempat bekerja kaum lelaki ini dari tempat tinggal mereka menyebabkan semakin sulit para wanita desa untuk mengontrol pendapatan suami mereka (Willer, 1980, 187). Istri-istri mereka tidak tahu berapa banyak upah yang diterima oleh si suami dan untuk apa saja uang itu digunakan oleh suami mereka. Karena para istri itu tetap tinggal di desa sementara suami mereka berkelana mencari pekerjaan jauh dari desa mereka.

Harus saya sebutkan di sini bahwa tidak semua kaum wanita harus "menderita" sebagai akibat dari pembangunan. Ann L Stoler (1988) yang mengadakan penelitian tentang dampak Revolusi Hijau di sebuah desa di Yogyakarta melaporkan bahwa kaum wanita kaya di desa tidak harus menderita karena akibat dari

kedatangan Revolusi Hijau di desa mereka seperti halnya dialami oleh kawan mereka yang miskin. Hal ini disebabkan karena hidup mereka tidak tergantung pada panen di desa mereka. Mereka hanya ikut panen kalau diundang oleh si pemilik sawah kalau tidak memperoleh undangan mereka tidak akan ikut panen (Ann L Stoler, 1988, 119). Kalau mereka diundang ikut panen mereka pun akan memperoleh *bawon* yang cukup karena yang mengundang mereka adalah para petani kaya. Sebaliknya kaum wanita miskin tidak memiliki fleksibilitas ekonomi untuk menentukan apakah mereka harus ikut panen atau tidak, mereka harus ikut panen karena panen merupakan satu-satunya sumber bagi mereka untuk memperoleh bahan makanan yang murah. Dengan demikian ketika Revolusi Hijau (baca: pembangunan pertanian) itu membatasi kebebasan mereka untuk ikut panen di desa mereka para buruh tani wanita itu kehilangan sumber bahan makanan mereka yang murah.

Apa yang dilaporkan Stoler itu memperjelas pemahaman kita tentang hubungan antara pembangunan dan peran ganda wanita di Indonesia. Pembangunan bahkan sering dapat mempersempit kesempatan kelompok wanita miskin untuk melestarikan peran ganda mereka yang memang telah lama merupakan bagian dari kehidupan mereka. Durning (1989) yang melihat adanya gejala pembangunan di negara sedang berkembang mempersempit kesempatan peran ganda wanita miskin akan menimbulkan suatu gejala baru di negara-negara yang sedang berkembang yang ia sebut sebagai gejala *femization of poverty*. Dan gejala ini akan semakin cepat melembaga dalam masyarakat ketika masyarakat tidak mau merubah

budaya yang mendiskriminasi wanita dan ketika pimpinan-pimpinan organisasi wanita terbelenggu oleh kegiatan yang didasarkan pada citra baku wanita dan bukan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memperjuangkan *martabat* wanita dalam pembangunan.

Apabila gejala *feminization of poverty* yang dikatakan oleh Durning itu benar, maka hal ini akan mempunyai dampak yang serius terhadap perkembangan bangsa-bangsa negara yang sedang berkembang. Wanita yang miskin dan mengalami diskriminasi tidak akan mampu menciptakan suatu bangsa yang sehat baik dari segi fisik maupun mental yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan negara. Apabila desa-desa di Indonesia dilanda oleh gejala *feminization of poverty*, mampukah kita sebagai bangsa memiliki generasi baru petani yang tangguh seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah?

### 3. Organisasi Wanita Masa Kini dan Otonomi Wanita

Membicarakan organisasi wanita pada masa kini tidaklah dapat dilepaskan dari kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dalam pengembangan stabilisasi politik dalam negeri Indonesia yang dibutuhkan agar pemerintah dapat mencurahkan segala perhatiannya pada pembangunan Indonesia.

Pada masa Orde Lama kaum wanita Indonesia sebagai halnya warga Indonesia lainnya menjadi terkotak-kotak dari segi ideologis karena keanggotaannya dalam berbagai partai politik. Dari sudut pandang pemerintah Orde Baru situasi seperti ini tidaklah menguntungkan baik dari segi kepentingan wanita sendiri maupun

kepentingan pembangunan nasional. Terkotak-kotaknya wanita dalam ormas-ormas wanita, telah membuat para wanita terlalu terlibat dalam perjuangan politik dan melupakan kegiatan-kegiatan lain yang langsung bermanfaat bagi pengembangan kesejahteraan hidup mereka. Terkotak-kotaknya wanita Indonesia dalam berbagai ormas juga mengganggu kerukunan politik antarwanita Indonesia.

Di samping itu masih ada pertimbangan politik lain yang dipakai oleh pemerintah Orde Baru dalam membina organisasi wanita Indonesia yakni mencegah agar wanita tidak menjadi alat bagi masuknya ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dalam keluarga mereka masing-masing. Pertimbangan politik inilah yang *melatar belakangi pembentukan* organisasi seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK. Dengan dibentuknya organisasi-organisasi ini pemerintah dapat membetengi pegawai negeri, anggota ABRI, dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kekuatan lain yang ada di masyarakat yang ingin menggunakan istri pegawai negeri, anggota ABRI, dan keluarga rakyat pedesaan/perkotaan non pegawai negeri atau non ABRI guna "menjual" ideologi non Pancasila.

Fungsi politik ini pula yang melatarbelakangi mengapa organisasi bentukan pemerintah itu memiliki struktur organisasi yang terkait dengan struktur organisasi resmi dimana suami para wanita itu bekerja. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa organisasi-organisasi itu dapat dikatakan sebagai rekayasa sosial yang diciptakan oleh pemerintah untuk melembagakan konsep *floating mass* di kalangan kaum

wanita dengan demikian potensi mereka dapat dikerahkan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional.

Kebijakan "mendepolitisikan" kaum wanita dan ormas-ormas wanita dan menjadikannya sebagai makhluk dan organisasi yang mendukung pembangunan menyebabkan di Indonesia pada saat ini jarang ada suatu organisasi wanita yang benar-benar secara mandiri dapat berfungsi sebagai *policy advocacy* terhadap permasalahan wanita Indonesia. Semua organisasi wanita di Indonesia pada saat ini diam terhadap permasalahan yang dihadapi oleh TKW Indonesia yang sering memperoleh perlakuan yang *sangat merendahkan martabat wanita*. Mungkin organisasi wanita Indonesia tidak berani mengeluarkan pendapat mereka karena TKW telah merupakan kebijakan pemerintah. Dalam situasi dimana organisasi wanita telah kehilangan otonomi mereka tidak dapat dielakkan munculnya kritik yang mengatakan bahwa saat ini *terjadi kemunduran pada organisasi wanita Indonesia*. Kritik ini semakin tajam ketika orang melihat bahwa dalam organisasi wanita tertentu, keanggotaan pada organisasi bersifat *kebaruan* dengan demikian dianggap menghilangkan *otonomi* wanita itu sendiri. Tetapi perlu diingat bahwa permasalahan ini bukan hanya permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dan kaum wanita Indonesia saja, kehilangan otonomi juga dialami oleh organisasi lain di Indonesia. Petani di Indonesia juga tidak memiliki organisasi petani yang mandiri karena dalam organisasi petani yang ada hampir seluruh posisi kunci diduduki oleh pejabat Departemen Pertanian atau mantan pejabat Departemen Pertanian.

Permasalahan yang dihadapi oleh kaum wanita Indonesia adalah sangat kompleks sifatnya dan hanya dapat dipecahkan apabila kaum wanita Indonesia *memiliki suatu organisasi* yang secara mandiri mampu berfungsi sebagai kekuatan lobi yang efektif baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dalam situasi Indonesia saat ini, organisasi wanita seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK mempunyai potensi yang kuat untuk menjadi kekuatan lobi bagi perjuangan kaum mereka. Para pimpinan organisasi itu mempunyai *direct access* pada para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Namun agar ketiga organisasi itu mampu membuat diri mereka menjadi kekuatan lobi kaum wanita, dibutuhkan satu perubahan persepsi pemerintah terhadap fungsi ketiga organisasi itu. Pemerintah harus melihat ketiga organisasi itu tidak hanya sebagai benteng yang membentengi penetrasi ideologi non Pancasila pada keluarga pegawai negeri/ABRI dan rakyat pada umumnya, namun ketiga organisasi itu harus diberi kesempatan bekerja sama dengan organisasi wanita lain berfungsi sebagai kekuatan lobi wanita. Untuk membuat ketiga organisasi mampu menjalankan fungsi lobi itu, *debirokratisasi* dalam tubuh ketiga organisasi itu perlu dilakukan. Pimpinan ketiga organisasi itu harus tidak mutlak dikaitkan dengan struktur pimpinan dinas pemerintah namun harus dikaitkan dengan kriteria baku dari pimpinan organisasi yang profesional. Ini perlu dilakukan oleh ketiga organisasi itu untuk mencegah timbulnya kesan di kalangan masyarakat bahwa organisasi itu hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Debirokratisasi juga perlu dilakukan

dalam ketiga organisasi itu agar dalam tubuh mereka dapat berkembang suatu jiwa *egaliterisme* sebagai dasar interaksi antar anggota ketiga organisasi itu sebagai layaknya yang terjadi dalam organisasi yang modern.

#### 4. Kesimpulan

Dari uraian di atas nampak jelas keadaan kaum wanita Indonesia tidak menentu. Di satu pihak wanita Indonesia dituntut untuk meningkatkan peranan mereka dalam pembangunan, namun pembangunan itu sendiri *tidak ramah* terhadap wanita. Usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh kaum wanita belum berhasil memecahkan masalah itu, karena usaha-usaha itu dikembangkan atas dasar konsep-konsep yang elitis seperti *kodrat wanita*. Usaha-usaha itu gagal mencapai tujuannya karena kaum wanita Indonesia pada saat ini tidak memiliki suatu organisasi yang mampu secara mandiri melakukan *fungsi lobi* yang memperjuangkan kepentingan sosial, budaya dan ekonomi wanita dalam proses pembangunan. Hal ini muncul sebagai akibat dari rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan semua ormas di Indonesia termasuk ormas wanita *banya* sebagai pendukung kebijaksanaan pembangunan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

**DURNING, Allan B**

- 1989 *Poverty and the environment: reversing the downward spiral*. Washington, D.C., Worldwatch Institute. (Worldwatch Paper 93).

**KATJASUNGKANA, Nursyahbani.,**

- 1989 "Domestikasi perempuan dalam karier", dalam *Berkala pesantren*, 6(2).

**MANDERSON, Lenore, ed.**

- 1983 *Women's work and women's roles : economics and everyday life in Indonesia, Malaysia And Singapore*. Canberra, The Australian National University (ANU Development Studies Center, Monograph Series no.32).

**NOERHADI, Tuty Heraty**

- 1989 "Bagaimana mengatasi kodrat", dalam *Berkala pesantren*, 6(2).

**PRICE, Susanna**

- 1983 "Rich woman, poor woman: occupation differences in a textile producing village in Central Java", dalam Lenore Anderson (ed), *Women's work and women's roles: economics and everyday life in Indonesia, Malaysia and Singapore*. Canberra, The Australian National University. (ANU Development Studies Center, Monograph Series no.32). Hal 97-110.

**STOLER, Ann L**

- 1988 "Rice harvesting in Kali Loro: a study of class and labor relation in rural Java", dalam John G. Taylor dan Andrew Turton, eds., *Sociology of developing societies Southeast Asia*. Houndmills, England, Macmillan Education. Hal 111-122.

**WILLNER, Ann Ruth**

- 1980 "Expanding women's horizons in Indonesia: toward maximum equality with minimum conflict" dalam S.A. Chipp dan J.J. Green, eds., *Asian women in transition*. Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press. Hal 182-190.